



Inspektorat Bukan Tempat Buangan

PONTIANAK—Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya meminta bupati dan walikota memperkuat Inspektorat Daerah di wilayahnya sehingga dapat melakukan pengawasan dengan baik. Pejabat atau pegawai negeri yang ditempatkan di sana harus lebih disiplin dan tidak pernah melakukan penyimpangan selama bekerja.



Christiandy Sanjaya



Tolong bupati dan walikota, perkuat inspektorat. Jangan dijadikan sebagai tempat buangan.

“Setidaknya ada tiga syarat sebagai pengawas di Inspektorat,” ujar Christiandy dalam pertemuan di Balai Petiti Kantor Gubernur Kalbar. Christiandy mengatakan, ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh siapapun yang akan ditempatkan di Inspektorat Daerah. Mereka harus disiplin, paham tentang aturan, dan bersih.

“Mereka harus lebih baik, jangan sampai mencari penyimpangan yang dilakukan seseorang tetapi dia sendiri menyimpang,” kata Christiandy. Menurutnya, pemprov telah mengikuti rapat koordinasi pengawasan nasional. Dalam pertemuan itu terungkap ada yang melaporkan bahwa Inspektorat Daerah sebagai tempat

buangan. Pejabat yang tidak disukai bupati ditempatkan di instansi tersebut.

“Tolong bupati dan walikota, perkuat inspektorat. Jangan dijadikan sebagai tempat buangan,” kata Christiandy. Pengawasan sangat penting untuk memastikan berjalannya pemerintahan dan kemajuan dari suatu daerah. Peranan inspektorat di daerah sangat besar untuk memastikan seluruh kinerja pemerintah daerah berjalan dengan baik. Kerugian yang paling besar adalah kerugian karena pemerintah tidak berjalan. “Diharapkan pengawasan harus semakin ketat. Pegawai harus bertugas mengawasi sistem

◆ Ke Halaman 15 kolom 5

Inspektorat Bukan Tempat Buangan

Sambungan dari Halaman 16

apakah sistem tersebut berjalan apa tidak,” ujarnya. Ia menambahkan pengawasan yang baik oleh Inspektorat Daerah mempengaruhi opini laporan hasil

pemeriksaan keuangan oleh BPK RI. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, baru 30 persen pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Diharapkan pada

2015 perolehan opini WTP dapat meningkat. “Tentunya tidak ingin pada 2015 peta sama dengan sebelumnya. Harus memperkuat inspektorat dan melakukan pengawasan dengan baik,” ujarnya. (uni)